UNAN

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG SETELAH OTONOMI DAERAH

Skripsi Oleh:

EDWARD C S

01071002083

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

507

S.
352.135 07
Edw
P
2014
C, 141457.

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG SETELAH OTONOMI DAERAH

Skripsi Oleh:

EDWARD C S

01071002083

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH *COST SHARING* TERHADAP KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama	: Edward CS
NIM	: 01071002083
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal,

20 Maret 2014

Dosen Pembimbing

Ketua

Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc

NIP: 131411409

Tanggal,

17 Maret 2014

Anggota

Dra. AnnaYulianita, SE, M.Si

NIP: 132325695

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG SETELAH OTONOMI DAERAH

Disusun oleh:

Nama	: Edward CS
NIM	: 01071002083
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 3 April 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, April 2014

Ketua	Anggota	Anggota
Drs. Fachrizal Bachri, M. Sc	Anna Yulianita, S.E, M. Si	Prof. Dr. Didik Susetyo , M.Si
NIP. 195710201984031002	NIP. 197007162008012015	NIP. 196007101987031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Edward CS
NIM	: 01071002083
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian	: Keuangan Daerah
Fakultas	: Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesehatan dan Pendidikan bagi Masyarakat di Kota Palembang Setelah Otonomi Daerah.

Pembimbing	:
Ketua	: Drs. Fachrizal Bachri, M. Sc
Anggota	: Anna Yulianita, S.E, M. Si
Tanggal Ujian	: 3 April 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, Maret 2014

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

8F10EACF156192821

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Edward CS

01071002083

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kesehatan dan Pendidikan bagi Masyarakat di Kota Palembang. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kesehatan dan Pendidikan bagi Masyarakat di Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
3. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Para Dosen Penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, 24 Maret 2014

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG SETELAH OTONOMI DAERAH

Oleh:

Edward CS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Keseh atan dan Pendidikan bagi masyarakat di Kota Palembang. Pendidikan dan Kesehatan merupakan bagian dari komponen untuk melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series tahunan periode 2003-2012 yang diperoleh dari BPS Kota Palembang dan juga dari Dinas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kota Palembang. Variabel yang digunakan adalah Dana perimbangan, angka harapan hidup, dan angka melek huruf. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif dengan mengunakan regresi linier berganda metode *OLS* (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat di Kota Palembang.

Kata Kunci: ***Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Dana Perimbangan***

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EQUALIZATION FUNDS ON PUBLIC HEALTH AND EDUCATION IN PALEMBANG AFTER THE REGIONAL AUTONOMY

by

Edward C. Saragih; Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc.; Anna Yulianita, S.E., M.Si.

The objective of this study was to find out how much was the influence of equalization funds on the public health and education in Palembang. Education and health are the components of public welfare. The data used in this study were secondary data, that is, the annual time-series data in the period of 2003-2012 from Palembang's Central Bureau of Statistics and from the Office of Central and Regional Financial Balance. The variables of the study were the equalization funds, life expectancy, and literacy rates. The technique of analysis was qualitative and quantitative by using a multiple linear regression, the OLS (Ordinary Least Squares) method. The results of this study indicated that the equalization funds had a significant positive influence on the public health and education in Palembang.

Keywords: *life expectancy, literacy rates, equalization funds*

Acknowledged by,

Ismail Petrus
Instructor at the English Language Laboratory
Graduate Programs of Sriwijaya University
Email: ismailpetrus@yahoo.com

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Edward Christison Saragih
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pematang Raya/ 16 Maret 1989
Agama	: Kristen Protestan
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Desa Panei Raya, Kec. Raya Kahean. Kab. Simalungun. Sumatera Utara
Alamat Email	: sumbayakedward@yahoo.co.id
No. HP	: 085268989822

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (1995-2001)	: SD Tiga Lama Panei Raya
SMP (2001-2004)	: SMP Methodist Binjai
SMA (2004-2007)	: SMA St. Yoseph Medan
Perguruan Tinggi (2007-2014)	: S1 Jurusan Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal:

-

Pengalaman Organisasi:

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141457
TANGGAL : 28 APR 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Landasan Teori 12

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah 12
2.1.2 Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah 13
2.1.2.1 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro 13
2.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro 17
2.1.3 Dana Perimbangan 18
2.1.4 Teori Transfer 27
2.1.5 Belanja Kesehatan 29
2.1.6 Belanja Pendidikan 31

2.1.7 Angka Harapan Hidup 33
2.1.8 Angka Melek Huruf 35
2.2 Penelitian Terdahulu 36
2.3 Kerangka Pemikiran 38
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 40
3.2 Jenis dan Sumber Data 40
3.3 Rancangan Penelitian 41
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 41
3.5 Teknik Analisis Data 42
3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda Dana Perimbangan 42
3.6 Uji Ekonometrika 43
3.6.1 Uji Statisitik 43
3.6.2 Uji Penyimpangan Klasik 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 47
4.1.1 Administratif Pemerintahan Kota Palembang 47
4.1.2 Keadaan Lingkungan Dan Ekonomi Kota Palembang 49
4.1.2.1 Sosial Ekonomi 49
4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Penduduk 49
4.1.2.3 Sarana Kesehatan di Kota Palembang 50
4.1.2.3 Sarana Pendidikan di Kota Palembang 52
4.2 Hasil dan Pembahasan 53
4.2.1 Hasil Pengujian Dana Perimbangan Terhadap Angka Harapan Hidup 53
4.2.1.1 Uji Penyimpangan Klasik 55
4.2.1.2 Uji Statistik Dana Perimbangan Terhadap AHH 58
4.2.2 Hasil Pengujian Dana Perimbangan Terhadap Angka Melek Huruf 60

4.2.2.1 Uji Penyimpangan Klasik 62
4.2.2.1 Uji Statistik Dana Perimbangan Terhadap AMH 65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 68
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran 69
Daftar Pustaka 70
Lampiran 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Dana Perimbangan Kota Palembang tahun 2003-2012 10

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin pada Januari Tahun 2012 49

Tabel 4.2 Jumlah Prakter Dokter Perorangan di Kota Palembang Tahun 2010-2011 53

Tabel 4.3 Data Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 2003-2012 55

Tabel 4.4 Data Statistik Hasil Estimasi 55

Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda 59

Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda 61

Tabel 4.7 Data Perkembangan Angka Melek Huruf dan Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 2003-2012 62

Tabel 4.8 Data Statistik Hasil Estimasi 62

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda 66

Tabel 4.10 Hasil Regresi Linear Berganda 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 39

Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas 56

Gambar 4.2 Uji Normalitas 57

Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas 63

Gambar 4.4 Uji Normalitas 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perkembangan Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 2003-2012 73

Lampiran 2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Palembang Tahun 2003-2012 73

Lampiran 3 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palembang Tahun 2003-2012 73

Lampiran 4 Hasil Output Regresi Linear Berganda Dana Perimbangan Terhadap Angka Harapan Hidup 74

Lampiran 5 Hasil Output Regresi Linear Berganda Dana Perimbangan Terhadapa Angka Melek huruf 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan dan perkembangan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu: *Pertama*, fungsi alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; *Kedua*, fungsi distribusi pembangunan, merupakan peranan pemerintah dalam dalam rangka mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan; *Ketiga*, fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan, keamanan dan ekonomi moneter (Mangkoesubroto, 1999:3).

Peranan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara sehingga tujuan pembangunan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Ketiga peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dimana pengaturan, pengeloalaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UPT PERPUSTAKAAN

daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah yang di kenal dengan era otonomi daerah (Nanik, 2009:1).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningatkan daya saing daerah dengan daerah lainnya dalam kegiatan perekonomian. Pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini maka pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Suparmoko, 2001:17).

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah mendapat keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran belanja, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah gun pemberdayaan

pemerintah daerah, dan masyarakat daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri. Menurut Yenida (2008:1), melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menkadi lebih sederhana dan cepat karena dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat seuai kewenangan yang ada.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Namun adanya perbedaan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah, menimbulkan perbedaan kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Dikebanyakan daerah sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga daerah tersebut memerlukan sejumlah dana tambahan untuk menutupi kebutuhan daerah tersebut. Dalam Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah

dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam (Galih, 2011:20).

Menurut Oates (1993), transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya, dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia transfer dari pemerintah pusat ke daerah berupa dana perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pelaksanaan transfer dana desentralisai fiskal yang diamanatkan Undang-undang otonomi daerah dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian dana transfer dari Pemerintah Pusat tersebut harus digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, terutama dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum mengingat sumber dana ini merupakan sumber dana utama bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Besaran Dana Alokasi Umum yang dibagikan tiap tahunnya sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, dimana 90% dari Dana Alokasi Umum akan dialokasikan kepada tiap kabupaten/kota dan sisanya sebesar 10% didistribusikan ke tiap provinsi. Implementasi Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang kaya Sumber Daya Alam dengan daerah yang miskin Sumber Daya Alamnya. Dengan

diberikannya dana transfer tersebut, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Imamudin, 2009:149).

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Menurut (Nanik, 2009:2), pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang menjalankan sistem disentralisasi fiskal, dimana sumber penerimaan terbesar daerah Kota Palembang itu sendiri masih dari dana perimbangan. Hal ini terlihat dari total penerimaan Dana Alokasi Umum masih dominan dibanding penerimaan daerah dari sumber yang lain. Ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan Kota Palembang

terhadap subsidi dari pemerintah pusat sangatlah besar, hal ini dapat disebabkan minornya sumber penerimaan daerah.

Kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Palembang dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerah agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kota Palembang yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di kawasan provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak potensi fiskal yang dapat digali dan dikembangkan dalam proses kegiatan perekonomiannya. Begitu juga dari sisi penerimaan dari transfer pemerintah pusat, Kota Palembang sebagai ibukota provinsi memiliki proporsi lebih besar. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara penyedia layanan publik bagi masyarakatnya (BPS Kota Palembang, 201:6).

Dalam kesempatan kali ini penulis menjadikan kesehatan dan pendidikan yang merupakan beberapa indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Salah satu aspek terpenting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara, karena masyarakat

yang sehat merupakan modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam meningkatkan status kesehatan. Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik dengan mutu sumber daya manusia. Dan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia, hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah (Yenida, 2008:5).

Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematiaan bayi dan angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di Negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam suatu mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup digunakan untuk

mengukur kemajuanpembangunan kesehatan, fisik, mental, sosial dan ekonomi suatu bangsa, dan juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kelangsungan hidup penduduk. Peningkatan Angka Harapan Hidup akan meningkatkan kemampuan hidup anak balita dan tumbuh menjadi remaja sehat yang diharapkan dapat memperoduksi generasi baru yang sehat. Angka harapan hidup penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar 69,6 (Indikator Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, 2012:12). Sedangkan Angka Harapan Hidup untuk Kota Palembang tahun 2010 sebesar 71,1 (BPS Kota Palembang, 2011:4).

Angka Harapan Hidup juga dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus di ikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, dan program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP) (Merna, 2009:10).

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu kebijakan nasional yang menjadi salah satu tugas pemerintah. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain faktor kemiskinan keluarga. (Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2010:3).

Secara umum tekad pemerintah untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat terlihat cukup besar. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan untuk itu pemerintah bertanggung jawab membiayainya. Melalui perubahan Pasal 31 UU 1945, tekad tersebut semakin diperkuat dengan adanya ketetapan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Persentase yang sama juga dimandatkan untuk dialokasikan oleh setiap daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing (Nina, 2004:17).

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Angka melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini

menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

Tabel 1.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Dana Perimbangan Kota Palembang

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Dana Perimbangan (juta rupiah)
2003	68.26	97.21	430.302.707
2004	69,50	97,45	453.025.738
2005	69, 87	98,02	555.153.260
2006	70,20	98,63	772.951.769
2007	70,43	98,33	973.499.814
2008	70,66	98,39	939.914.612
2009	70.90	98,69	947.773.915
2010	71,13	98,71	954.950.318
2011	71,37	97,34	986.745. 210
2012	71,58	98,94	997.678.352

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Palembang Dalam Angka 2011 & http://www.bps.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dana Perimbangan, Kesehatan, dan Pendidikan di Kota Palembang. Adapun judul dari penelitian ini adalah "**Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kesehatan dan Pendidikan bagi Masyarakat di Kota Palembang Setelah Otonomi Daerah".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dianalisis oleh penulis adalah bagaimana Dana Perimbangan mempengaruhi Kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat di Kota Palembang setelah diberlakukannya otonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dana Perimbangan mempengaruhi Kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat di Kota Palembang setelah diberlakukannya otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalah yang dibahas penelitian ini, manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pengaruh Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat di Kota Palembang.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Djakfar. 2007. "*Analsisis Pengaruh Pengeluaran Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Selatan*". *Tesis.* Tidak Dipublikasikan. PPS Universitas Sriwijaya. Palembang.

Arifi, Ahmad, 2008. *Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan (Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 % dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah). Yogyakarta.*

Azzumar, M. Rizky. 2011. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2011. Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Bahl, Roy W., 2000. *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform* dalam *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.

BPS. 2009. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Palembang.

Ghozali, Imam dan Fuad. 2005. *Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54).* Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Hadi Sasana, 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10,* No.1, *Juni 2009, hal. 103 – 124*

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat,
Jakarta.

Herwastoeti, 2006. *Konsep desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Malang.

H. Preston, Samuel, et.all, 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes,* Blackwell, USA.

http://www.djpk.depkeu.go.id

Yuliadi, Imamudin. 2009. *Perekonomian Indonesia masalah dan Implementasi Kebijakan.* Yogyakarta. UPFE

Kumalasati, Merna, 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Tesis.* Solo. UNS.

Kurnia, Akhmad Syakir, "*Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull(FDH)', Jurnal Ekonomi Pembangunan* , Vol 11, No.1:1-20.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga

Mangkoesoebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik.* Penerbit BPFE. Yogyakarta

Mardiasmo, 2001." *Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*", Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada , Yogyakarta.

Mokh Khusaini dan Ferry Prasetya, 2004. *Kinerja Pemerintah Daerah Di Era Desentralisasi Fiskal:Analisis Dampak Anggaran Daerah Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang*, Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Nina Tomayah dan Syaikhu Usman, 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah :Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar.* Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.

Nuansa, Robert.2006. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Rutin dan Pengeluaran Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi.* Indralaya. UNSRI.

Nurkolis. 2012. *Belanja Pendidikan Tersedot untuk Pegawai.* Program Pascasarjana MP IKIP PGRI. Semarang

Oates, W, 1993, *Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal*, XLVI. 237-243

Oktavian, Eko.2004. *Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur. (Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan). Tesis.* Palembang. Pascasarjana UNSRI.

PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. *Tentang Dana Perimbangan.*

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah.*

Sidik, Dr. Machfud dkk. 2002. *DAU Konsep, Hambatan, dan Prospek Di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: *Kompas.*

Sunandar dan Nurkolis. 2011. *Efisienkah Belanja Kabupaten?.* Program Pascasarjana MP IKIP PGRI. Semarang.

M. Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Udjianto, Didit Welly. 2008. *Analisis Dana Perimbangan Antara Pusat dan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol 5. UPN, Yogyakarta.

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wahyuni, nanik. 2009. *Analisis Ratio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. Skripsi.* Universitas Negeri Malang.

Wahyuni S, Noer. 2008. *Analisis Daktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Sektor Pendidikan di Kota palembang. Skripsi.* Universitas Sriwiwjaya. Tidak dipublikasikan.

Widjaya, H.A.W, 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yenida dan Zaitul Ikhlas Saad. 2008. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belaja Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol 3. STISIP, Padang.

Yuliadi, Dr. Imamudin. 2009. *Perekonomian Indonesia masalah dan Implementasi Kebijakan.* Yogyakarta: Unit Penerbit Fakultas EKonomi UMY.